

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia sudah memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Hal itu turut tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realitanya cita-cita tersebut belum dapat terlihat wujudnya dalam masyarakat. Masih terlihat banyak masyarakat yang masih jauh dari kata makmur. Kita tidak akan sulit untuk menemukan masyarakat yang masih tergolong masyarakat miskin di setiap daerah di Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah yang besar dikarenakan kemiskinan dapat menjadi penghambat bagi sebuah negara dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kemiskinan pula dapat memberikan dampak yang negatif bagi kondisi sosial dan ekonomi sebuah negara apabila tidak ditangani dengan benar. Definisi kemiskinan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung melalui sudut pandang apa kita memandang kemiskinan itu sendiri. Tentu saja definisi kemiskinan menurut sudut pandang ekonomi berbeda dengan definisi kemiskinan menurut sudut pandang ahli sosial.

Menurut Suparlan (2014) kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Melalui pernyataan di atas dapat kita petik bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang ataupun sebuah golongan di dalam masyarakat berada pada titik ketidakmampuan mengikuti atau

dapat dikatakan menyamai standar untuk hidup yang ada dan berlaku di wilayah tempat tinggalnya. Dengan keadaan demikian, suatu golongan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tuntutan di wilayah tempat tinggalnya.

Pada tahun 2007 pemerintah yang diwakili oleh kementerian sosial membentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini berbentuk bantuan dana yang disalurkan kepada keluarga miskin pada daerah-daerah di Indonesia dalam bimbingan dan pengawasan kementerian sosial. dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan juga merubah pola fikir serta perilaku keluarga yang kurang mampu. Pernyataan di atas sesuai dengan yang tertuang dalam PERMENSOS RI NO. 1 Tahun 2018 pasal (1) ayat 1 yaitu “PKH adalah program yang berbentuk bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan telah terdaftar dalam data program penanganan fakir miskin”(Kemensos, 2018). Kemudian terlampir pula pada pasal (2) yang berisi tentang tujuan PKH yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Tidak semua keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin yang dapat menerima bantuan PKH. Namun terdapat beberapa kriteria yang didasarkan pada tiga komponen utama. Komponen-komponen tersebut terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pemberian bantuan berupa dana menjadi hal yang sangat berarti bagi keluarga miskin mengingat pendapatan mereka yang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Selain memberikan bantuan dana, program PKH juga juga memberikan berupa bimbingan yang juga pemberdayaan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilaksanakan setiap sebulan sekali secara bergantian di rumah para KPM. Pelaksanaan pemberdayaan ini berlandaskan pada tujuan dari PKH untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Bimbingan dan Pemberdayaan dalam program ini dilaksanakan oleh pendamping KPM. Pendampingan ini juga dilakukan untuk mengarahkan KPM agar dapat memanfaatkan dana bantuan sesuai dengan tujuannya.

Menciptakan keluarga yang sejahtera dapat juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas seorang manusia agar dapat mengatasi segala tantangan yang akan dihadapinya. PKH dalam hal ini sudah memikirkan hal tersebut. Asumsi ini juga didasarkan pada pemberian tiga komponen bantuan pada masyarakat miskin seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ketiga komponen tersebut yang terdiri dari komponen kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Menurut peneliti yang memiliki dampak paling besar adalah

komponen pendidikan. Alasan peneliti mengatakan asumsi tersebut dikarenakan pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan individu atau masyarakat yang berkualitas. Pelaksanaan pendidikan yang baik tentu akan menciptakan generasi penerus yang baik pula.

Pemberian dana bantuan PKH komponen pendidikan ini merupakan bentuk program yang bersifat berkelanjutan. Artinya dalam hal pendidikan bagi masyarakat miskin pemerintah sudah memberikan sarana dengan program bantuan-bantuan dana maupun bentuk program lainnya yang dianggap memudahkan masyarakat miskin untuk dapat memiliki pendidikan yang layak dengan harapan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi keluarganya agar kemudian dapat merubah nasib keluarganya menjadi lebih sejahtera.

Program PKH dilakukan di beberapa desa di Indonesia dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam desa tersebut dan setiap kelompok memiliki satu orang pendamping. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap sekelompok KPM di desa Pelawi utara Kecamatan Babalan. Berdasarkan penjelasan singkat peneliti dengan salah seorang pendamping kelompok KPM di desa Pelawi Utara tersebut. Tersebut pula dari pendamping KPM tersebut bahwa seluruh anggota kelompok yang dibimbingnya terdata menjadi penerima manfaat komponen pendidikan dan beberapa diantaranya mendapatkan bantuan komponen kesehatan seperti dana bantuan bagi balita bagi KPM yang memenuhi kriteria. Berbeda dengan desa

lainnya di desa Pelawi utara PKH untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2015 dan masih berlanjut hingga sekarang.

Adapun alasan penulis memilih topik perilaku KPM dalam memanfaatkan dana bantuan PKH komponen dana pendidikan adalah dikarenakan hasil observasi sementara penulis yang melihat bahwa bentuk hunian serta aset-aset yang dimiliki oleh KPM dapat dikatakan tidak seperti keluarga miskin. Terlihat beberapa hunian KPM yang sudah berbentuk tembok beton bahkan beberapa KPM sudah memiliki kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan kriteria keluarga miskin yang sudah diputuskan oleh BPS. Namun, penulis akan memastikan terlebih dahulu status hunian KPM desa Pelawi Utara untuk mengetahui apakah hunian tersebut milik pribadi atau rumah kontrakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPM tersebut merupakan keluarga yang kurang mampu atau sudah sejahtera.

Selanjutnya, setelah mendapatkan data tentang kriteria penerima PKH tersebut penulis akan mendeskripsikan perilaku KPM dalam memanfaatkan dana bantuan PKH komponen pendidikan. bentuk bantuan yang berupa dana tunai langsung kepada para anggota PKH dapat menjadi hal yang cukup rawan untuk kemudian dimanfaatkan tidak sesuai dengan arahan ataupun tujuan dana tunai tersebut. Asumsi di atas diperkuat juga dengan status KPM yang merupakan keluarga miskin yang memiliki pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana pendidikan bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain di luar keperluan pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian yang muncul dapat dirumuskan yaitu?

1. Seperti apa kriteria penerima bantuan PKH di desa Pelawi Utara?
2. Bagaimana perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Pelawi Utara dalam memanfaatkan dana bantuan PKH komponen Pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui kriteria penerima bantuan PKH di desa Pelawi Utara
2. Mendeskripsikan perilaku KPM di desa Pelawi Utara dalam memanfaatkan dana bantuan PKH komponen pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri 2 hal. Yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan khususnya bagi ilmu sosial. Serta dapat menjadi kajian atau rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan tema pemetaan kemiskinan perkotaan, pedesaan dan pesisir.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang pertama adalah bagi pemerintah agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program bantuan-bantuan sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya bagi masyarakat agar dapat mengetahui manfaat program bantuan dan dapat memanfaatkannya dengan baik.

